

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki pluralitas suku, bahasa, budaya dan agama terbesar di dunia.<sup>1</sup> Selain kekayaan sumber daya alam yang melimpah, pluralitas yang melekat pada negara Indonesia ini memantik perhatian masyarakat berbagai negara untuk datang ke Indonesia dan melihat lebih dekat seperti apa persisnya pluralitas masyarakat Indonesia itu.

Pluralitas agama merupakan salah satu elemen yang membentuk struktur bangunan pluralitas bangsa Indonesia. Ada enam agama yang diakui secara resmi oleh negara yakni Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu. Selain enam agama besar ini, Indonesia juga memiliki 187 aliran kepercayaan tradisional yang sudah didata oleh Pemerintah.<sup>2</sup> Fakta ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara yang paling plural di dunia. Kenyataan pluralitas agama yang dimiliki oleh Indonesia turut mempertegas kekhasan Indonesia sebagai bangsa religius; dan menginspirasi para pendiri bangsa menyertakan Tuhan atau wujud yang tertinggi pada sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila Pertama ini menunjukkan bahwa negara Indonesia dibangun berdasarkan prinsip ketuhanan yang ada dalam semua agama dan kepercayaan tradisional. Prinsip ketuhanan ini menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan agama secara tegas dari kehidupan sosial masyarakatnya.

Menurut Franz Magnis Suseno, pluralisme adalah hakikat bangsa Indonesia yang dibangun di atas dasar Pancasila. Pluralisme adalah suatu

---

<sup>1</sup>Robert W. Hefner, *Multikulturalisme di Indonesia: Keragaman, Identitas, dan Konflik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2016), hlm. 23.

<sup>2</sup> Moh. Nadlir, "Ada 187 Kelompok Penghayat Kepercayaan yang Terdaftar di Pemerintah" (*Online*), <https://nasional.kompas.com/read/2017/11/09/12190141/ada-187-kelompok-penghayat-kepercayaan-yang-terdaftar-di-pemerintah?page=all>, diakses pada 7 Juli 2022.

pandangan hidup yang menerima bahwa manusia mempunyai kepercayaan yang berbeda-beda, tetapi perbedaan ini tidak memisahkan tetapi justru menyatukan. Persatuan ini terungkap dalam nilai-nilai yang dimiliki oleh semua agama, seperti penghormatan terhadap martabat manusia, penolakan terhadap kekerasan atas nama agama, keadilan, kebebasan beragama, berpendapat dan berekspresi, serta solidaritas dengan kaum miskin dan tertindas.<sup>3</sup>

Pengakuan dan penghayatan nilai-nilai agama ini merupakan pilar penting bagi terwujudnya situasi kerukunan hidup antarumat beragama. Kehidupan beragama yang rukun ditandai oleh situasi di mana semua warga negara Indonesia dari golongan agama dan keyakinan apa pun dapat menjalankan dan mengalami kehidupan yang damai, sejahtera dan adil di tengah situasi keberagaman. Namun kerukunan antaragama di Indonesia masih menjadi “barang mahal” atau nilai yang harus diperjuangkan setiap saat mengingat banyak kisah sejarah hidup bersama masyarakat Indonesia yang kerap diwarnai oleh fenomena konflik antarumat beragama, kekerasan atas nama agama, juga penindasan dan tindakan diskriminatif oleh kelompok/golongan agama mayoritas terhadap umat agama minoritas. Perbedaan etnis dan kepelemukan terhadap suatu agama, sering dijadikan sebagai alat yang memicu konflik dan perpecahan. Bahkan berbagai tindakan kekerasan justru dilegitimasi oleh nilai-nilai substansial sebuah agama. Aksi-aksi kekerasan yang dipertontonkan dengan legitimasi nilai-nilai sakral keagamaan kemudian menghasilkan stigma negatif tentang agama sebagai sumber kekerasan.<sup>4</sup>

Berbagai klaim kebenaran yang eksklusif adalah bibit-bibit penumbuh stigma negatif dalam diri pemeluk agamanya terhadap pemeluk agama lain. Isi ajaran agama dimengerti dan diterjemahkan secara harfiah, kemudian dijadikan basis klaim untuk membenarkan berbagai macam tindakan menyingkirkan kelompok pemeluk agama lain. Para pemeluk agama yang berakar pada klaim

---

<sup>3</sup> Franz Magnis-Suseno, *Kebangsaan, Demokrasi, Pluralisme: Bunga Rampai Etika Politik Aktual* (Jakarta: Kompas, 2015), hlm. 93-94.

<sup>4</sup> Ibnu Hasan Muchtar, dalam *Riuh di Beranda Satu: Peta Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, Departemen Agama RI bekerja sama dengan Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan serta Puslitbang Kehidupan Beragama (Jakarta: DEPAG RI, 2003), hlm. 203.

kebenaran eksklusif, yang membaca dan menafsir teks-teks suci agama secara harfiah atau satu cara pandang, kemudian terjebak dalam fanatisme sempit, fundamentalisme dan radikalisme, yang menganggap segala hal dalam agamanya adalah jalan satu-satunya menuju surga, dan ajaran-ajaran di luar agamanya adalah jalan sesat menuju kebinasaan. Wawasan yang sempit menjadikan para pemeluk agamanya memiliki perspektif yang terbatas dan akhirnya mereka memahami realitas dan masa depan hanya menurut satu kebenaran saja.

Agama yang menjadi sumber kerukunan justru dilihat dari segi peran destruktif anggota-anggotanya; kehadiran agama di ruang publik dinilai secara tidak seimbang karena menyiratkan aksi-aksi kekerasan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok radikal.<sup>5</sup>

Selain kekerasan, konflik keagamaan juga tampil dalam fenomena politisasi agama, di mana isu agama dijadikan sebagai alat oleh para politisi untuk mendapatkan kekuasaan. Menurut Hendardi, berbagai kekerasan bernuansa agama yang belakangan terjadi disebabkan karena menguatnya politisasi agama untuk kekuasaan atau kepentingan tertentu. Politisasi agama tersebut kemudian mewujud pada tindakan intoleransi, persekusi, dan diskriminasi.<sup>6</sup> Albertus B. Laksana dalam tulisannya “The Pain of Being Hybrid: Catholic Writers and political Islam in Postcolonial Indonesia” mempresentasikan tentang situasi perpolitikan Indonesia dalam beberapa dekade terakhir. Albertus menegaskan, geliat politisasi agama di Indonesia telah mencoreng wajah perpolitikan Indonesia yang berlandaskan prinsip demokrasi. Agama begitu mudah diadu domba dan dimanfaatkan oleh para elite politik untuk menggalang dukungan politik. Albertus menilai ketegangan politik ini menyebabkan wacana baru tentang identitas negara yang terpasung dalam domain agama dan ras tertentu. Pluralitas sebagai suatu

---

<sup>5</sup> F. Budi Hardiman, “Konsep Habermas Tentang Masyarakat Post-Sekular Serta Diskursus tentang Relasi Agama dan Negara di Indonesia”, dalam *Dialektika Sekularisasi, Jurnal Ledalero*, 10:1 (Ledalero: Juni 2011), hlm. 8.

<sup>6</sup> Kristian Erdianto, "Setara Institute: Politisasi Agama Adalah Cara Paling Buruk untuk Meraih Kekuasaan", dikutip dalam <https://nasional.kompas.com/read/2018/02/20/18151221/setara-institute-politisasi-agama-adalah-cara-paling-buruk-untuk-meraih>, diakses pada 7 Juli 2022.

keniscayaan bagi bangsa Indonesia diperbenturkan dengan berbagai gerakan politik parsial yang nir demokrasi dan toleransi.<sup>7</sup>

Konflik lain yang dapat dilihat dalam tubuh negara adalah pertikaian dan percecokan yang mengatasnamakan agama terjadi seperti: gerakan anti-Cina dan konflik agama di Maluku. Konflik antara agama di Maluku bermula dari persoalan etnis dan polemik politik bernuansa primordial. Pihak yang terlibat dalam masyarakat dari agama yang berbeda yaitu antara umat Muslim dan umat Kristen. Konflik tersebut bahkan mengusung ideologi “membunuh atas nama Allah/*Killing in the name of God*”.<sup>8</sup>

Akhir-akhir ini fenomena kerukunan antarumat beragama ditantang juga oleh adanya berbagai ujaran kebencian dan penodaan berbasis SARA yang menyebar di berbagai *platform* media sosial (3.640 kasus dalam rentang waktu tahun 2018-2021). Kasus ujaran kebencian dan penodaan terhadap agama menjadi salah satu persoalan yang rawan menimbulkan berbagai konflik dan gesekan antarpemeluk agama dalam kehidupan bermasyarakat. Selain itu, kasus ujaran kebencian dan penodaan agama juga semakin menyuburkan berbagai prasangka negatif terhadap kelompok-kelompok tertentu, termasuk kelompok agama.<sup>9</sup>

Menurut Sarwono, prasangka memiliki fungsi jalan pintas, yaitu langsung menilai sesuatu tanpa memprosesnya secara terperinci dalam alam pikiran (kognisi). Gunanya adalah agar kita tidak terlalu lama membuang waktu dan energi untuk sesuatu yang telah terlebih dahulu kita ketahui dampaknya. Akibatnya, kebanyakan orang mudah terjebak dalam prasangka negatif dalam menilai seseorang atau kelompok tertentu, seperti dalam kasus ujaran kebencian berbasis SARA di Media Sosial. Prasangka negatif ini tidak jarang menimbulkan konflik antarumat beragama dalam sejarah Indonesia. Konflik Ambon menjadi

---

<sup>7</sup> Albertus B. Laksana, “The Pain of Being Hybrid: Catholic Writers and Political Islam in Postcolonial Indonesia”, dalam: *International Journal of Asian Christianity*, Vol. 1, 2018, p.226.

<sup>8</sup> Chris Wilson, *Ethno-Religious Violence In Indonesia: From Soil To God* (New York: Routledge 270 Madison Avenue, 2008), p. 148.

<sup>9</sup> [https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran pers](https://www.kominfo.go.id/content/detail/34136/siaran-pers-no-143hmkominfo042021-tentang-sejak-2018-kominfo-tangani-3640-ujaran-kebencian-berbasis-sara-di-ruang-digital/0/siaran%20pers) diakses pada 7 oktober 2022.

salah satu contoh di mana prasangka negatif Islam-Kristen menjadi pemicu konflik berdarah yang menewaskan ratusan nyawa manusia.<sup>10</sup>

Berhadapan dengan berbagai konflik keagamaan yang menjadi tantangan dalam perwujudan kerukunan hidup antarumat beragama di Indonesia, peran semua pemeluk agama dan kepercayaan tradisional untuk terlibat dalam berbagai cara adalah sumbangan berarti yang sungguh dibutuhkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Agama-agama dituntut untuk proaktif mencermati dan memahami secara sungguh-sungguh berbagai tantangan serta melakukan aksi nyata mewujudkan kerukunan hidup beragama di Indonesia yang plural. Gereja menyadari panggilannya untuk menjadi garam dan terang dunia terhadap berbagai fenomena sosial tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras dan golongan (bdk. Mat. 5:13-16).

Perhatian Gereja terhadap persoalan kerukunan antarumat beragama dapat dilihat dalam dokumen-dokumen Gereja, secara khusus Dokumen Konsili Vatikan II. Dalam bagian pendahuluan no. 1 “Pernyataan Tentang Hubungan Gereja dengan Agama-Agama bukan Kristen” (*Nostra Aetate*) dinyatakan: “Semua bangsa merupakan satu masyarakat, mempunyai satu asal, sebab Allah menghendaki segenap umat manusia mendiami seluruh muka bumi. Semua juga mempunyai satu tujuan akhir, yakni Allah”, yang penyelenggaraannya, meliputi semua orang.<sup>11</sup> Selain itu, dalam pernyataan tentang kebebasan beragama *Dignitatis Humanae*, no. 6, dijelaskan:

Pada hakikatnya termasuk tugas dan tanggung jawab setiap kuasa sipil: melindungi dan mengembangkan hak-hak manusia yang tak dapat diganggu gugat. Maka kuasa sipil wajib melalui hukum-hukum yang adil serta upaya-upaya lainnya yang sesuai, secara berhasil-guna menanggung perlindungan kebebasan beragama semua warga negara dan menciptakan kondisi-kondisi

---

<sup>10</sup> S. W.Sarwono, *Psikologi Prasangka* (Jakarta: C.V. Rajawali, 2006), dikutip oleh Christiany Juditha, “Stereotip dan Prasangka dalam Konflik Etnis Tionghoa dan Bugis Makassar”, *Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 12, No.1, Juni 2015, hlm. 90.

<sup>11</sup> Konsili Vatikan II, *Dokumen Konsili Vatikan II*, Penerj. R. Hardawiryana, cet. XI (Jakarta: Obor, 2012), hlm. 319.

yang menguntungkan dan mengembangkan kehidupan keagamaan.<sup>12</sup>

Uraian di atas menggambarkan perhatian Gereja dalam hal menggumuli isu berbagai konflik antaragama dan usaha-usaha menciptakan dan menjaga kerukunan antaragama. Tindakan-tindakan Gereja atas nama agama paling kurang menegaskan isi ajaran setiap agama yang mengajarkan kasih dan perdamaian, penghormatan terhadap martabat pribadi setiap orang tanpa diskriminasi. Tindakan memelihara kerukunan antarumat beragama merupakan tugas penting semua lapisan; masyarakat sipil, para pemeluk agama dan terutama lembaga negara.

Berbagai potret kelabu masa silam di atas menjadikan Indonesia bak “Perpustakaan besar” yang menyimpan arsip dan buku-buku tebal berisi cerita-cerita kekerasan, anarkisme, radikalisme dan fundamentalisme; darinya setiap orang membaca dan memahami serta menentukan langkah-langkah penataan hidup bersama. Negara sebagai “rumah besar” tempat semua pemeluk agama tinggal menyadari tanggung jawabnya sebagai pemeran utama dalam menciptakan keadilan, kerukunan, perdamaian bagi semua warganya. Berhadapan dengan kenyataan-kenyataan konflik dan kekerasan antarumat beragama, negara melalui kementerian agama membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama. Adanya forum khusus yang diiniasi oleh negara untuk mempertemukan agama-agama dan menjalin kerukunan hidup bersama merupakan hal baik dan benar; sangat bermanfaat bagi kehidupan bersama di tengah kondisi plural masyarakat Indonesia.

Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Sikka merupakan forum yang mewadahi perjumpaan antarumat beragama. Dalam konteks hubungan antarumat beragama di kabupaten Sikka, Forum Kerukunan Umat beragama ada sebagai ruang untuk berbicara tentang persoalan hidup bersama dalam keberagaman. Forum ini ikut memperlancar komunikasi antartokoh agama dan meningkatkan kerukunan hidup beragama. Forum ini pula sebagai aksi solidaritas antarumat beragama demi mencapai kebaikan bersama di tengah masyarakat.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 397.

Penulis merasa tertarik untuk mengkaji lebih jauh persoalan kerukunan antarumat beragama dalam Forum Kerukunan Umat Beragama dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka melalui tulisan tugas akhir dengan judul: **Peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam Menjaga Kerukunan Antarumat Beragama di Kabupaten Sikka.**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas, maka penulis merumuskan masalah pokok/ utama dalam tulisan ini adalah apa peran kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka? Berdasarkan masalah pokoknya dirumuskan masalah turunannya sebagai berikut: *pertama*, apa saja fakta-fakta konflik dan kekerasan atas nama agama yang pernah terjadi di kabupaten Sikka. *Kedua*, sejauh mana Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) kabupaten Sikka relevan dan menjadi inspirasi dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka?

## **1.3. Tujuan Penulisan**

### **1.3.1. Tujuan Umum**

Tujuan umum penulisan tesis ini adalah sebagai prasyarat untuk menyelesaikan program studi Pasca Sarjana (S2) di Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif (IFTK) Ledalero

### **1.3.2. Tujuan Khusus**

Ada tiga (3) tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan tesis ini, yaitu: *Pertama*, mengetahui peran dan kegiatan yang telah dilakukan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka. *Kedua*, mengetahui fakta-fakta konflik dan kekerasan yang pernah terjadi di kabupaten Sikka. *Ketiga*, untuk meninjau efektivitas kinerja FKUB dalam menjaga kerukunan umat beragama di kabupaten Sikka.

## **1.4. Metode Penelitian**

Proses pengerjaan Tesis ini penulis menggunakan dua metode yaitu: Metode penelitian kepustakaan dan metode penelitian lapangan.

### **1.4.1. Sumber penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini adalah kajian kepustakaan dan data penelitian lapangan. Kajian kepustakaan dari buku-buku, kamus, jurnal, dokumen-dokumen dari Kantor Agama kabupaten Sikka, ensiklopedia, dan internet yang berhubungan dengan tema penulisan yang dikaji. Sedangkan data penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan para informan tentang tema yang dibahas dalam penelitian ini.

### **1.4.2. Prosedur Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini penulis menggali informasi tentang kinerja Lembaga Kerukunan Umat Beragama dalam usaha merawat dan memelihara toleransi hidup beragama di kabupaten Sikka. Adapun jenis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah data Kualitatif.

### **1.4.3. Instrumen Pengumpulan Data**

Dalam proses pengumpulan data kepustakaan, peneliti menggali sumber-sumber dari buku, jurnal *online*, dan dokumen-dokumen sebagai bahan deskripsi, komparasi dan refleksi untuk mendapatkan pandangan yang komprehensif mengenai persoalan kekerasan dan konflik antarumat beragama di kabupaten Sikka serta peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menciptakan kerukunan dan perdamaian. Sedangkan untuk data penelitian lapangan penulis menggunakan metode wawancara dengan beberapa informan dari anggota FKUB kabupaten Sikka.

### 1.3 Sistematika Penulisan

Dalam tulisan ini pembahasan tentang Peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga Kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka, dibagi dalam lima bab. Bab I berisi pendahuluan. Pada bab ini penulis menguraikan latar belakang persoalan yang mendorong penulis untuk menulis tema ini, rumusan pokok persoalan, metode penulisan, tujuan penulisan dan sistematika penulisan.

Bab II berisi gambaran tentang kabupaten Sikka; lokus telaah penulis soal isu kerukunan umat beragama. Ada beberapa bagian penting yang penulis uraikan dalam bab ini yakni sejarah pembentukan kabupaten Sikka, visi dan misi kabupaten Sikka, potensi dan wilayah administratif kabupaten Sikka, profil kabupaten Sikka yang meliputi letak geografis, kehidupan sosial, ekonomi, politik dan kehidupan religius masyarakat kabupaten Sikka. Bagian-bagian yang menggambarkan kabupaten Sikka merupakan satu-kesatuan yang memiliki pengaruh dan korelasi penting; antara situasi dan kondisi masyarakat dengan isu-isu yang pernah dan sedang terjadi, terutama isu konflik dan kekerasan atas nama agama yang mengancam dan merusak kerukunan hidup antarumat beragama di kabupaten Sikka.

Bab III penulis uraikan secara detail profil, sejarah lahir dan kiprah Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Sikka dalam menjaga dan memelihara kerukunan antarumat beragama. Beberapa hal penting yang menjadi sorotan dalam bab ini yakni apa saja Visi Misi Forum Kerukunan Umat Beragama dan bagaimana kiprahnya dalam menangani masalah-masalah konflik horizontal antarpemeluk agama.

Bab IV berisi catatan evaluatif terhadap peran Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Sikka. Ada beberapa bagian besar dalam bab ini yakni analisis hasil penelitian penulis, ulasan tentang dialog yang kerap digunakan sebagai metode andalan dalam membangun kerukunan antarumat beragama, kegiatan-kegiatan dialogis yang telah diupayakan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama di kabupaten Sikka dan berbagai gerakan sosial lainnya yang diadakan

oleh masyarakat dan melibatkan lembaga pendukung seperti Forum Kerukunan Umat Beragama ini.

Bab V berisi kesimpulan dan saran. Sambil memberikan kesimpulan atas seluruh pembahasan mengenai peran Forum Kerukunan Umat Beragama dalam menjaga kerukunan antarumat beragama di kabupaten Sikka, penulis juga menyampaikan beberapa saran yang perlu menjadi bahan evaluasi bagi Forum Kerukunan Umat Beragama, Pemerintah Daerah, para pimpinan dan anggota pemeluk agama, dan masyarakat kabupaten Sikka seluruhnya.